
**BUDAYA, EKONOMI, DAN AGAMA ETNIS TIONGHOA DI SEMARANG
TAHUN 1959 - 2000**

M. Irfan Hakim[✉] & Hamdan Tri Atmaja

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Semarang-Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Noveember 2020
Disetujui Desember 2020
Dipublikasikan Desember
2020

Keywords:
Budaya, Masyarakat,
Tionghoa, Semarang

Abstrak

Etnis Tionghoa di Indonesia mengalami banyak perlakuan yang berbeda dengan warga asli Indonesia. Perlakuan tersebut sudah muncul sejak masa VOC menguasai Indonesia. Perlakuan tersebut muncul Kembali pada masa akhir Orde Lama dan pada masa Orde Baru berkuasa hingga akhirnya hilang Ketika Soeharto tumbang dari kursi presiden, kemudian muncul masa Reformasi. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang perkembangan kebudayaan, ekonomi dan religi etnis Tionghoa di Semarang. Penelitian ini menggunakan empat tahap metode penelitian sejarah, yaitu heuristic, kritik sumber, interpretasi dan historiografi dengan menganalisa sumber sumber yang didapatkan dilapangan. Hasil dari penelitian ini adalah, etnis Tionghoa di Semarang mengalami perbedaan perlakuan di tiga masa pemerintahan tersebut. Di masa orde Lama mereka masih bebas melakukan kegiatan keagamaan dan kebudayaan, serta ekonomi. Di masa Orde Baru kegiatan kebudayaan dan keagamaan dilarang dan hanya boleh kegaitan ekonomi saja. Di masa Reformasi etnis Tionghoa boleh melakukan kepercayaan dan kebudayaan mereka dan tidak dibatasi hanya di perekonomian saja.

Abstract

Ethnic Chinese in Indonesia experience many different treatments from native Indonesians. This treatment has emerged since the time when the VOC controlled Indonesia. This treatment resurfaced at the end of the Old Order and during the New Order era until it finally disappeared. When Suharto fell from the presidency, then the Reformation period emerged. In this research, the writer discusses the development of Chinese culture, economy and religion in Semarang. This study uses four stages of historical research methods, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography by analyzing the sources obtained in the field. The result of this research is that Chinese ethbists in Semarang have experienced different treatment in the three periods of government. During the Old Order era they were still free to carry out religious and cultural activities, as well as economically. During the New Order era, cultural and religious activities were prohibited and only economic activities were allowed. During the Reformation era, Chinese ethnic groups were allowed to practice their beliefs and culture and were not limited to the economy.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: [Mohirfan554@gmail.com](mailto: Mohirfan554@gmail.com)

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana mereka merupakan mempunyai naluri untuk hidup dalam lingkungan sosial. Hubungan yang mereka lakukan, memicu timbulnya kelompok-kelompok sosial yang lebih besar lagi yang disebut sebagai masyarakat. Pola dari masyarakat adalah dinamis, yang mana mereka akan selalu berkembang dan terus membesar seiring dengan waktu yang terus berjalan. (Wertheim, 1999). Dengan berbagai konflik yang terus terjadi, masyarakat majemuk Indonesia mengalami kesulitan dalam menerapkan integrasi ke dalam Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia terus mengalami pergolakan untuk penguatan basis etnis yang diterapkan dalam proses demokratisasi pada seluruh sektor bermasyarakat. (Salim, 2006)

Indonesia merupakan negara yang sejak dulu kala menerima kedatangan dari segala etnis, salah satunya adalah etnis Tionghoa. Kebanyakan dari kedatangan mereka merupakan untuk kebutuhan berdagang, namun secara tidak langsung mereka membawa serta kebudayaan dari tanah asal mereka, bahkan mereka secara tidak langsung mengenalkan kepercayaan mereka kepada penduduk pribumi. Hal itu menjadikan Indonesia mempunyai banyak kebudayaan baik dari segi Bahasa, adat istiadat juga agama. (Suryadinata, 1984). Salah satu persoalan diantara pribumi dan etnis Tionghoa adalah persoalan asimilasi yang di tuju untuk terjadinya keutuhan bangsa. Hal ini kemudian terulang kembali pada masa Orde Baru, pada masa itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk undang-undang yang secara tidak langsung mengakibatkan perpecahan antara etnis Tionghoa dan warga Indonesia. Diantara kebijakan tersebut adalah dibatasinya etnis Tionghoa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, kebudayaan yang berbau Cina seperti perayaan hari besar Tionghoa, diskriminasi dalam kependudukan, serta dibatasinya dalam bidang pekerjaan dan hanya boleh berdagang. (Suryadinata, 2002).

Kebijakan tersebut menjadikan terhambatnya asimilasi antara etnis Tionghoa

dan warga Indonesia lainnya. Dalam penelitian yang di tulis oleh saudara Amir Faisal mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2019 yang berjudul "Dinamika Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa Dengan Jawa Di Kecamatan Welahan Dari Masa Orde Baru Sampai Dengan Reformasi " penelitian tersebut mengkaji tentang interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi di kecamatan Welahan. (faisal, 2019). Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nur Hidayah dan Retno Winarni pada tahun 2014 yang berjudul "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa Di Bidang Politik, Sosial Budaya, Dan Ekonomi Di Kabupaten Jember Dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman Reformasi Pada Tahun 1998-2012 " penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kebijakan pada Orde Lama hingga Reformasi terhadap kehidupan etnis Tionghoa di Jember, dan juga bagaimana perkembangannya hingga masa Reformasi. (Winarni,

2014). Penelitian lain yang penulis temukan adalah dilakukan oleh saudara Premadha Novita Shandy mahasiswi Universitas Diponegoro pada tahun 2014 tentang " Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Budaya & Ekonomi Keturunan Tionghoa Di Pecinan Semarang,

1967-2002 " . penelitian ini berfokus pada kehidupan ekonomi dan budaya etnis Tionghoa Semarang pada masa Orde Baru hingga Reformasi. (Shandy, 2014). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya focus pada Orde Baru hingga Reformasi namun dari masa Orde Lama dan juga berisi tentang keagamaan etnis Tionghoa di Semarang. Semarang merupakan daerah dengan tingkat keragaman etnis yang tinggi, hal itu disebabkan posisinya yang strategis dan mempunyai salah satu Pelabuhan yang ramai yaitu Pelabuhan Tanjung Mas. Keragaman etnis dapat ditemui disini mulai dari etnis Khoja, Melayu, India, dan etnis Tionghoa. Hingga saat ini etnis yang bukan asli Indonesia yang paling banyak di temui di Semarang adalah etnis Tionghoa, hal itu merupakan yang membuat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dari mulai

masa Orde Lama hingga Reformasi etnisTionghoa mengalami berbagai macam diskriminasi yang dating langsung dari pemerintah, dan itu disebabkan latar belakang politik yang naik turun. Namun pada masa Reformasi, pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan banyak kelonggaran terhadap etnis Tionghoa. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Perkembangan kebudayaan masyarakat tionghoa di kota Semarang dari Orde Lama hingga Masa Reformasi ? (2) Bagaimana perkembangan Ekonomi terhadap kehidupan masyarakat tionghoa di semarang, Orde Lama hingga Masa Reformasi?(3) Bagaimana perkembangan agama pada Orde Lama hingga Masa Reformasi ?

METODE

Proses awal dalam melakukan sebuah penelitian sejarah adalah pencarian sumber-sumber atau bukti sejarah, tahap ini disebut Heuristik(Kuntowijoyo, 2018) pada tahap pengumpulan sumber ini, sumber primer diperoleh melalui beberapa tempat penyimpanan arsip diantaranya adalah Monumen Pers, disana terdapat banyak surat kabar diantaranya adalah Suara Merdeka yang berisi saat saat pencabutan Inpres No.14 Tahun 1967 oleh Gus Dus pada tahun 2000. Penulis juga mencari mencari peraturan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pada masa itu. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam, penulis menggunakan sumber dari Internet salah satunya adalah KITLV.NL yang berisi foto foto Semarang pada masa sebelum kemerdekaan. Khusus untuk sumber lisan, penulsi mewawancarai salah satu penduduk Semarang dari keturunan etnis Tionghoa, yang merasakan periode dari masa Orde Lama hingga Reformasi. Sebagai perbandingan penulis menggunakan juga suber-suber sekunder hingga tersier dari beberapa buku, jurnal ilmiah, artikel yang berkaitan dengan etnis Tionghoa.

Proses yang kedua adalah Verifikasi atau kritik sumber. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kredibilitas dan autentisitas sumber (Kuntowijoyo, 2018). Dalam tahap ini,

sumber sumber berita maupun surat kabar yang dimuat Suara merdeka, diuji dan ditelaah lebih lanjut sehingga sumber dapat dipastikan keaslian nya. Penulis melakukan kritik intern maupun ekster terhadap sumber-sumber yang penulis dapatkan , baik itu berupa koran, photo, arsip pemerintahan amuoun sumber sumber lisan hasil wawancara tentu perlu analisis lanjutan guna mendapatkan fakta yang sinkron dengan fakta-fakta yang lain. Dengan merangkai fakta-fakta yang didapat, serta penafsiran penulis berdasarkan data-data yang telah diseleksi dan dilakukan kritik sumber, tahap ini disebut Interpretasi. (Kuntowijoyo, 2018). Historiografi merupakan tahapan akhir dalam penulisan sejarah(Kuntowijoyo, 2018) dalam tahapan ini fakta-fakta yang terkumpul kemudian ditulis dalam bentuk yang deskriptif – analisis.

PEMBAHASAN

Perkembangan Kebudayaan Etnis Tionghoa Di Semarang.

Masa Orde Lama

Etnis Tionghoa sangat memgang erat tradisi yang telah dilakukan oleh leluhur mereka dan meneruskan nya hingga ke anak cucu mereka. Pada awal kemerdekaan etnis Tionghoa di Semarang melakukan kegiatan kebudayaan seperti Imlek, Cap Go Meh, pergelaran Liong dan Barongsai dengan meriah seperti yang dituturkan oleh bapak Jongkie Tio berikut :

“.. dulu waktu Orde lama itu boleh ada arak arakan, jadi jam5 pagi berangkat dari (kelenteng) Tay Kak Sie arak-arakan besar pergi ke gedung batu kemudian saingnya pulang, waktu Orde Lama memang diadakan secara besar besaran...”

Dari informasi yang diceritakan oleh Bapak Jongkie Tio tersebtu data di lihat bahwa perayaan arak-arakan patung dari kelenteng Tay Kak Sie berlangsung secara besar besaran. Akhir masa orde Lama, pemerintah mulai mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi pergerakan etnis Tionghoa. April 1958 kepala staff Angkatan Darat A.H Nasution mengeluarkan peraturan dilarangnya surat kabar

berbahasa Cina. (Sin Po, 18 April 1958). Terutama setelah terjadinya insiden G30S PKI semakin banyak peraturan yang membatasi kegiatan etnis Tionghoa.

Masa Orde Baru

Munculnya Soeharto adalah hasil dari Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dan kemudian lahir Orde Baru. Peraturan-peraturan baru eremunculan salah satunya adalah Inpres No.14 Tahun 1967 yang berisi tentang agama kepercayaan dan adat istiadat Cina. Dampak dari terbitnya Inpres ini sangat berdampak terhadap kehidupan etnis Tionghoa hingga sekarang. Di tutupnya kelenteng dan dilarang untuk digunakan bahkan untuk renovasi memerlukan izin khusus (Suara Merdeka 22-1-2001 hal 1), dilarang untuk melakukan adat istiadat Cina dimuka umum, agama Konghucu dihapuskan dari agama resmi. Dampak dari Inpres ini menyebabkannya berkurangnya pemeluk agama Konghucu (Suara Merdeka 24-01-2001 hal 18) dan munculnya lost generation atau ketidaktahuan peranan etnis Tionghoa terhadap budaya mereka sendiri dan ini juga terjadi di Semarang (wawancara dengan Bapak Jongkie Tio 27 oktober 2020).

Masa Reformasi

Dimulai dengan tumbang Soeharto dari kursi presiden, dan kemudian pada tahun 2000 Gus Dur menjabat dan mencabut Inpres No.14 Tahun 1967. Setelah hal itu diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa Semarang berangsur-angsur berkurang.

Perkembangan Ekonomi Etnis Tionghoa Di Semarang

Masa Orde Lama

Kedudukan Tionghoa pada bidang perdagangan menguat setelah Indonesia merdeka dari Jepang. Tahun 1959 KENSI (konferensi Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia) sebuah organisasi yang dikuasai Pribumi melaporkan pada tahun 1957 pendapatan Nasional Indonesia berjumlah 144.700 juta rupiah diantaranya, yaitu 34,7 % dari seluruh pendapatan nasional Indonesia

berasal dari pedagang Tionghoa asing. (Topik, 17 Mei 1972 hal 20). Walaupun namun tidak semua orang Tionghoa menguasai perekonomian Indonesia. Masa Orde Lama pemerintah beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak pada pribumi dari pada etnis Tionghoa seperti sistem Beteng. Walaupun pada akhirnya sistem ini Beteng gagal karena tidak berhasil mencetak wirausahawan dari pribumi. Tidak hanya itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk melarang pedagang dari etnis Tionghoa dilarang berjauhan di desa. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1959).

Masa Orde Baru

Akibat dari Inpres No.14 tahun 1967 etnis Tionghoa, memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang perekonomian terutama perdagangan. Walaupun semenjak dahulu kala etnis Tionghoa memang berkecimpung dalam bidang ekonomi, namun pada masa ini etnis Tionghoa tidak diberi pilihan pada bidang pekerjaan selain dalam bidang ekonomi. Di Semarang sendiri etnis Tionghoa dalam berdagang terpusat di Pecinan, terlihat dari ramainya perputaran ekonomi di daerah tersebut dan letak pecinan yang berada di tengah kota Semarang.

Masa Reformasi

Jatuhnya Soeharto dari kursi presiden Indonesia menjadi awal yang baik bagi bangsa Indonesia terkhusus etnis Tionghoa. Disusul dengan penghapusan Inpres No.14 tahun 1967 semakin membuka peluang pekerjaan bagi etnis Tionghoa. Walaupun tetap banyak yang tetap berkecimpung dalam bidang ekonomi namun berangsur-angsur generasi muda Tionghoa juga terjun dalam bidang yang lain termasuk politik.

Perkembangan Keagamaan Etnis Tionghoa Di Semarang

Masa Orde Lama

Pada masa ini etnis Tionghoa di Semarang melakukan kegiatan sebagaimana warga pada umumnya. Perayaan dilakukan secara meriah bahkan lebih meriah daripada perayaan pada

masa Reformasi (Wawancara dengan bapak Jongkie Tio).

Masa Orde Baru

Inpres No.14 Tahun 1967 mengubah segalanya Ketika dikeluarkan oleh Soeharto. Segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan Cina dan kepercayaan yang berasal dari Cina (Konghu Cu) dilarang dipertontonkan di depan umum. Hal itu membuat sembahyang dilakukan dirumah masing masingdan Kelenteng dilarang untuk dipakai, bahkan Ketika ingin di cat, harus meminta izin kepada pemerintah daerah (Suara Merdeka 22 Januari 2001, hal 1).

Dalam mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) etnis Tionghoa tidak diperbolehkan untuk menyebut didalam KTP beragama Konghucu karena saat itu Konghucu tidak resmi menjadi agama di Indonesia, mereka diharuskan mengisi dengan agama lain yang sudah ada di Indonesia dalam daftar isian permohonan kartu penduduk atau hanya diberi tanda (-) yang berarti tidak memiliki agama. Bahkan ada perguruan tinggi yang memaksa seorang calon dokter yang memeluk Agama Khonghucu agar bersedia melakukan sumpah jabatannya sebagai dokter dengan memilih salah satu agama yang dianggap resmi. Keadaan ini (berlakunya Inpres No.14 Tahun 1967) berjalan hingga Soeharto lengser pada tahun 1998. Hal ini berdampak dengan banyaknya dari etnis Tionghoa berpindah ke agama lain, bahkan hingga mencapai 70 persen (Suara Merdeka 24 Januari 2001 hal 18) disisi lain dampak yang dirasakan adalah banyak dari generasi keturunan etnis Tionghoa di Semarang yang mengalami *lost generation* sehingga kebudayaan dari leluhur mereka tidak diwariskan kepada generasi muda. (wawancara dengan Bapak Jongkie Tio 27 oktober 2020).

Masa Reformasi

Tahun 2000 Gus Dur mencabut Inpres No14 Tahun 1967 sehingga membawa angin segar bagi masyarakat etnis Tionghoa. Hal itu dilakukan januari sehingga etnis Tionghoa dapat merayakan Imlek yang jatuh pada Februari tahun itu. Masarakat Tionghoa Semarang menyambut

itu dengan suka cita yang diungkapkan dengan mendoakan Gus Dur pada malam Imlek (Suara Merdeka. 3-02-2000. hal 15). Tidak hanya etnis Tionghoa namun juga seluruh lapisan masyarakat ikut serta merayakannya hal itu terlihat di beberapa pusat hiburan di Semarang yang ikut memeriahkannya dengan mendekorasi dengan warna merah dan mengadakan event Imlek (Suara Merdeka. 3-02-2000. hal 15).

KESIMPULAN

Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah yang mempunyai etnis yang beragama didalamnya, salah satunya adalah etnis Tionghoa yang mempunyai sejarah Panjang di negri ini. Etnis Tionghoa di Semarang menjadi persoalan yang penting bagi pemerintah pusat maupun daerah. Karena secara kultural mereka mempunyai budaya, adagam dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat jawa. Pemerintah mempunyai pemikiran tersendiri terkait hal itu, yang kemudian munculah kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meleburkan antara masyarakat jawa dan Tionghoa. Pemerintah mengeluarkan kebijakan- kebijakan yang telah berdampak terhadap agama, kebudayaan serta ekonomi etnis Tionghoa Semarang, hal yang paling terlihat adalah dari segi kebudayaan dan agama. Yang dirasakan oleh msyarakat Tionghoa adalah muncul nya *lost generation* dikalangan keturunan etnis Tionghoa Semarang, yang di maksud dengan *lost generation* adalah mereka yang lahir setelah Orde Baru tidak banyak mengenal tentang budaya mereka, bahkan banyak dari mereka yang berpindah keyakinan karena saat itu Konghucu dilarang. Pelayanan pemerintahan dalam hal ini administrasi banyak dari kalangan etnis Tionghoa yang di himbau untuk mengisi agama yang resmi pada kolom agama karena Konghucu bukan agama resmi saat itu.

Turun nya Soeharto menjadikan pemerintahan Reformasi menjadi lebih demokratis Kembali. Berbagai kebijakan baru yang di terbitkan oleh pemerintahan tidakada lagi yang berisi tentang pembauran ataupun asimilasi. Pemerintahan Remormasi seakan

melepas tali yang mengikat dada etnis Tionghoa
Sehingga dapat bernafas lebih lega.

DAFTAR PUSTAKA

- faisal, amir. (2019). *Dinamika Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa Dengan Jawa Di Kecamatan Welahan Dari Masa Orde Baru Sampai Dengan Reformasi*. universitas negeri semarang.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit Tiara Wacana.
- Salim, A. (2006). *Stratifikasi Etnik: Kajian Mikro Sosiologi Interaksi Etni Jawa dan Cina*. Penerbit Tiara Wacana.
- Shandy, P. N. (2014). *Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Budaya & Ekonomi Keturunan Tionghoa Di Pecinan Semarang, 1967-2002*. Universitas Diponegoro.
- Suryadinata, L. (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. PT. Grafiti Press.
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- wertheim. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Tiara Wacana.
- Winarni, N. H. dan R. (2014). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik Sosial Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama sampai Zaman Reformasi pada tahun 1998-2012*. Publika Budaya.
- Surat Kabar
“Dulu Mengecat Pagar Harus Lapor...”
Suara merdeka 22 januari 2001.
“Imlek 2552, Awal Kebangkitan Kong Hu Cu” Suara Merdeka 24 Januari 2001
“Dirayakan Mesti Tak Semeriah Tahun Baru Masehi...” Suara Merdeka 24 Januari 2001
“Warga Tionghoa Doakan Gus Dur” Suara Merdeka. 3-02-2000. hal 15.